

**PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN
KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN DAN KEDAULATAN RAKYAT**

Rahma Nur Aulia¹, Edy Soesanto²

¹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. E-mail: 202410255010@mhs.ubharajaya.ac.id

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. E-mail: edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2025-01-31
Review : 2025-01-31
Accepted : 2025-01-31
Published : 2025-01-31

KEYWORDS

Pancasila, Public Policy, Social Welfare, Sovereignty, Pancasila Values.

A B S T R A C T

Pancasila, as the ideology of the Indonesian state, plays a pivotal role in shaping public policies aimed at enhancing the welfare and sovereignty of the people. Each principle in Pancasila—Belief in One Supreme God, Just and Civilized Humanity, Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Inner Wisdom in Unanimity Amongst Representatives, and Social Justice for All Indonesians—serves as a normative guideline in policy-making processes. This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in public policy in Indonesia and its impact on societal welfare. Using a qualitative approach, the study employs literature analysis from various relevant sources. The findings reveal that consistent application of Pancasila values can enhance public participation, reduce social inequality, and promote social justice. However, challenges such as corruption, social injustice, and lack of transparency remain significant obstacles requiring strategic solutions. In conclusion, applying Pancasila values in public policy is essential to achieving a fair and prosperous society.

A B S T R A K

Kata Kunci: Pancasila, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Rakyat, Keadaulatan, Nilai-Nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Setiap nilai dalam Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berfungsi sebagai pedoman normatif dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan analisis literatur dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat memperkuat partisipasi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan keadilan sosial. Namun, tantangan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan kurangnya transparansi menjadi hambatan utama yang memerlukan solusi strategis. Kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik sangat diperlukan untuk

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman yang memuat nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pandangan hidup, tetapi juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kelima silanya memberikan panduan normatif bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang adil, merata, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Sebagai dasar ideologi, Pancasila memuat lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila ini memiliki nilai-nilai mendasar yang saling berkaitan dan menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik. Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman, sedangkan sila Kerakyatan mengutamakan prinsip demokrasi yang memberikan ruang partisipasi kepada rakyat dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, sila Keadilan Sosial menjadi tujuan utama dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ideologi merupakan landasan berpikir yang fundamental, mencakup pandangan menyeluruh tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan. Selain itu, terdapat pula pemikiran turunan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering kali gagal diinterpretasikan sebagai ideologi yang benar-benar mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial yang terkandung dalam kelima silanya.

Sebagai ideologi yang utuh dan tidak terpisahkan, Pancasila harus dijaga dari upaya menyandingkannya dengan ideologi lain, seperti komunisme ateistik maupun kapitalisme sekuler, yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Ide-ide seperti NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) dan paham komunisme dianggap sebagai pengkhianatan terhadap makna sejati Pancasila. Pada era Orde Baru, partai dan ideologi komunis dinyatakan sebagai hal yang terlarang karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bangsa. Di sisi lain, kapitalisme liberal, yang menekankan kepentingan individu di atas kesejahteraan bersama, juga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan keimanan, Indonesia menjadikan nilai-nilai religius, seperti keimanan dan ketakwaan, sebagai fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tidak hanya selaras dengan sila pertama Pancasila, tetapi juga dengan kodrat manusia yang membutuhkan nilai-nilai spiritual dalam menjalani kehidupannya.

Namun, ketika pemahaman terhadap agama terabaikan, muncul pengaruh ideologi yang bertentangan. Dalam bukunya *Manifesto Komunis*, Karl Marx dan Friedrich Engels menyatakan bahwa agama adalah "candu masyarakat," yang harus dibatasi

perannya dalam kehidupan publik. Pandangan ini menjadi dasar bagi ideologi sekularisme yang berusaha memisahkan agama dari urusan negara dan masyarakat.

Sekularisme, yang menjauhkan masyarakat dan negara dari nilai-nilai religius, berdampak negatif pada moralitas publik. Hal ini terlihat dalam meningkatnya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya akuntabilitas. Dalam sistem pemerintahan, para wakil rakyat yang seharusnya melayani dan mengurus kepentingan rakyat justru sering kali menyalahgunakan wewenang mereka, menindas, dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini masih jauh dari nilai-nilai agama dan Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, memperkuat integrasi antara prinsip agama dan kehidupan bernegara, serta memperbaiki moralitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Handayani dan Dinie Anggraeni Dewi (2021). Mereka menekankan bahwa implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kebijakan publik dapat memperkuat integritas bangsa, meningkatkan rasa persatuan, dan menciptakan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, pendidikan dan pemahaman mendalam tentang Pancasila menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan publik.

KBRN, Tual: Andi Ridwan Mengatakan, Implementasi Pancasila dalam kebijakan publik sangat penting. Setiap kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam sektor ekonomi, kebijakan yang mendukung ekonomi rakyat dan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat relevan dengan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ratna Sari dan Fatma Ulfatun Najicha (2022) juga menyoroti pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Menurut mereka, pemahaman yang baik tentang Pancasila akan membentuk pola pikir yang lebih kritis dan konstruktif dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga tercipta kebijakan yang benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Kedua, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Ketiga, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembuatan kebijakan. Ini sejalan dengan sila Kerakyatan yang mengutamakan musyawarah dan partisipasi. Namun, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi, yang sering kali menghambat implementasi kebijakan publik yang berbasis Pancasila. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan lainnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ketimpangan ini sering kali menyebabkan

kebijakan yang dihasilkan tidak mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam hal ini, pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila, tetapi juga untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metodologi menggunakan studi literatur dengan identifikasi matrik persamaan dan perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis pentingnya Penerapan Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kedaulatan Rakyat, metodologi ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari jurnal – jurnal ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir.

NO	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	“IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH”(Wijayanto et al., 2023)	Wijayanto, F. N., Felicia Sadida, K., Pradipta, I. P., & Maharani, A. (2023)	menekankan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman normatif dalam pembentukan kebijakan publik di berbagai bidang, dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan kurangnya transparansi, serta merekomendasikan pendidikan tentang Pancasila, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas..	Paper menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, berfokus pada dampak normatif nilai-nilai Pancasila terhadap kesejahteraan masyarakat, menekankan kolaborasi lintas pihak dan integrasi nilai religius; sedangkan jurnal Barnett, H. (2021) membahas implementasi sektoral Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, dengan solusi spesifik seperti reformasi birokrasi dan kebijakan ekonomi berbasis kerakyatan.
2	“Metodologi Penelitian Kualitatif”(Murdiyanto, 2020)	Murdiyanto, E. (2020)	Keduanya sama-sama mendalami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Indonesia dengan metode kualitatif dan analisis isi.	Paper menganalisis kasus-kasus nyata penerapan Pancasila, sementara jurnal Murdiyanto, E. (2020) membahas metode penelitian kualitatif.

3	“Indikator Kesejahteraan Sosial di Indonesia”(Statistik/BPS-Statistics, 2023)	Badan Pusat Statistik / BPS (2022)	Baik data BPS (2022) maupun Paperi sama-sama menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan pentingnya kebijakan publik yang berbasis nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi masalah tersebut.	data BPS memberikan gambaran umum tentang ketidakmerataan pendapatan, penelitian ini menggali lebih dalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan dan mengusulkan kebijakan yang lebih adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
4	"Pancasila dan Tantangan Masa Kini."(Situru, 2019)	Situru, R. S. (2019).	Sama sama sepakat bahwa pendidikan Pancasila adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, yang keduanya teliti melalui metode kualitatif.	Paper lebih fokus pada gambaran konkret penerapan Pancasila dalam kebijakan-kebijakan tertentu, Jurnal " Pancasila dan Tantangan Masa Kini. " lebih kritis dalam menganalisis tantangan mendasar yang dihadapi oleh ideologi Pancasila dalam era modern.
5	“PENTINGNYA PRINSIP KEBIJAKSANAAN BERDASARKAN PANCASIL A DALAM KEHIDUPAN HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA ” Wiguna, 2021)	(Wiguna, 2021)	menyoroti pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan fokus pada penerapannya dalam kebijakan publik, hukum, dan demokrasi, menggunakan analisis literatur untuk mengkaji nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, serta menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis serta meningkatkan kualitas pemerintahan dan pengambilan keputusan.	Paper membahas penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat, sementara (Wiguna, 2021 fokus pada prinsip Pancasila dalam sistem hukum dan demokrasi; Paper menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tantangan korupsi dan ketidakadilan sosial, serta rekomendasi partisipasi masyarakat, sedangkan (Wiguna, 2021) mengedepankan analisis teoretis dengan tantangan supremasi hukum dan rekomendasi keselarasan produk hukum dengan Pancasila.
6	“Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada	Kusumawardani, S. S., Budimansyah, D., Triyanto, Wibowo,	membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Paper berfokus pada analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam

	Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan”(Kusumawardani et al., 2024)	W., & Copik, M. (2024)	Indonesia, menekankan pendidikan kewarganegaraan dan pemahaman Pancasila sebagai landasan dalam membangun masyarakat dan kebijakan publik, serta menyoroti bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi pedoman untuk membentuk perilaku masyarakat dan pemerintah demi mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik melalui komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait.	kebijakan publik untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, menyoroti isu-isu seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan transparansi, dengan mengusulkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai solusi strategis, sedangkan Jurnal 2, sebagai buku ajar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, bertujuan membangun pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter individu, tanpa pembahasan khusus mengenai kebijakan publik.
7	“Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa”(Amalia & Najicha, 2023)	Amalia & Najicha, (2023)	Keduanya ini sepakat bahwa pendidikan dan penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkeadilan, namun menghadapi tantangan seperti korupsi dan kurangnya pemahaman nilai-nilai dasar.	Jurnal 1 lebih berfokus pada penerapan dalam kebijakan publik, sedangkan Jurnal 2 lebih menyoroti pembangunan karakter individu dan masyarakat.
8	“Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi.” (Sosial &	Fuqoha, F., & Firdausi, I. A. (2020)	membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, dengan tujuan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena sosial, serta menekankan manfaat penerapan	Paper fokus pada pengembangan karakter generasi muda melalui pendidikan karakter yang menekankan moralitas, spiritualitas, dan sosial yang ditanamkan melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat, sementara Jurnal Fuqoha, F., & Firdausi, I. A. (2020) membahas bagaimana

	Raya, 2020)		Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial, memperkuat integritas bangsa, dan mendorong keterlibatan masyarakat..	Pancasila dapat diaktualisasikan melalui media sosial dengan menyoroti peran media sosial dalam mempengaruhi ideologi dan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
9	“Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan dan Keamanan” (Barnett, 2021)	Intan Dewi Rahayumaulida & Qotrunnada	Sama sama menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar kebijakan seringkali terkendala oleh masalah korupsi dan minimnya partisipasi masyarakat.	Dua penelitian ini membahas Pancasila dalam kebijakan negara, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Satu fokus pada kesejahteraan, yang lain pada berbagai sektor.
10	“Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas” (Anggono & Damaitu, 2021)	Bayu Dwi Anggono & Emanuel Raja Damaitu	sama-sama bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya Pancasila sebagai landasan bagi pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera, serta menekankan peran pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.	Paper lebih berfokus pada kebijakan publik dalam konteks kontemporer, sedangkan Jurnal Bayu Dwi Anggono & Emanuel Raja Damaitu memiliki orientasi strategis terhadap pembangunan nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan sumber data berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, publikasi akademik, serta referensi hukum, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data menggunakan platform seperti Google Scholar dan SINTA, dan dianalisis melalui metode analisis isi yang mengkategorikan tema berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan sektor kebijakan, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait tantangan dalam implementasi nilai-nilai tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus pada aspek-aspek yang beragam, seperti penguatan integritas bangsa, pengurangan ketimpangan sosial, serta peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.

No	Hasil Perbedaan (X)	Analisa (Y)	Hipotesa
1	Pancasila menjadi dasar ideologi negara yang membentuk karakter bangsa dengan nilai kerukunan, keadilan sosial, dan persatuan.	Nilai-nilai Pancasila, seperti sila ketiga (Persatuan Indonesia) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), memastikan terciptanya harmoni di tengah keberagaman bangsa.	X1 dan Y1 tidak berhubungan
2	Paper menganalisis kasus-kasus nyata penerapan Pancasila, sementara jurnal Murdiyanto, E. (2020) membahas metode penelitian kualitatif.	Penelitian berbasis kasus memberikan wawasan konkret tentang penerapan Pancasila, sementara pendekatan metodologis kualitatif mendukung pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi tersebut.	X2 dan Y2 berhubungan
3	Data BPS memberikan gambaran umum tentang ketidakmerataan pendapatan, penelitian ini menggali lebih dalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan dan mengusulkan kebijakan yang lebih adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila.	Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami faktor struktural ketimpangan ekonomi. Nilai keadilan sosial dari sila kelima Pancasila menjadi kerangka utama dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil.	X3 dan Y3 tidak berhubungan
4	Paper lebih fokus pada gambaran konkret penerapan Pancasila dalam kebijakan-kebijakan tertentu, sementara jurnal "Pancasila dan Tantangan Masa Kini" lebih kritis dalam menganalisis tantangan mendasar yang dihadapi oleh ideologi Pancasila dalam era modern.	Meskipun fokusnya berbeda, kedua pendekatan saling melengkapi. Analisis kritis membantu mengidentifikasi tantangan ideologi, sedangkan studi konkret menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dioperasionalkan dalam kebijakan sehari-hari.	X4 dan Y4 berhubungan

Penerapan Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kedaulatan Rakyat

5	Andi Irmayanti, RRI (2024) lebih berorientasi pada praktik implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan sektoral, sementara paper menyajikan kerangka teoritis yang lebih luas tentang penerapan Pancasila dalam kebijakan secara umum.	Kerangka teoritis memberikan dasar pemikiran yang luas, sedangkan fokus sektoral menunjukkan aplikasi praktis dari teori tersebut. Keduanya penting dalam memastikan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif di berbagai sektor.	X5 dan Y5 berhubungan
6	Wijayanto et al., (2023) lebih mendeskripsikan bagaimana Pancasila diterapkan dalam praktik, sedangkan paper ini menggali lebih dalam makna dan penerapannya, terutama dalam kebijakan sosial.	Penelitian tentang penerapan langsung menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang berlandaskan Pancasila. Analisis mendalam memberikan wawasan teoretis yang dapat memperkuat dasar kebijakan tersebut.	X6 dan Y6 berhubungan
7	Paper lebih berfokus pada penerapan dalam kebijakan publik, sedangkan Jurnal Amalia & Najicha, (2023) lebih menyoroti pembangunan karakter individu dan masyarakat.	Pendekatan pada kebijakan publik memastikan dampak yang lebih luas secara struktural, sementara fokus pada individu memperkuat fondasi sosial melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap warga negara.	X7 dan Y7 berhubungan
8	Kedua jurnal mengkaji Pancasila dalam kebijakan publik, namun dengan sudut pandang berbeda: yang pertama lebih praktis, yang kedua lebih teoritis.	Pendekatan praktis menunjukkan bagaimana kebijakan berbasis Pancasila dapat diimplementasikan, sedangkan sudut pandang teoretis membantu memahami konteks dan prinsip dasar yang mendasarinya.	X8 dan Y8 berhubungan
9	Kedua penelitian ini membahas Pancasila dalam kebijakan negara, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Satu fokus pada kesejahteraan, yang lain pada berbagai sektor.	Kebijakan berbasis kesejahteraan menitikberatkan pada distribusi manfaat sosial, sedangkan pendekatan sektoral menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang spesifik.	X9 dan Y9 berhubungan

10	Paper lebih berfokus pada kebijakan publik dalam konteks kontemporer, sedangkan Jurnal Bayu Dwi Anggono & Emanuel Raja Damaitu memiliki orientasi strategis terhadap pembangunan nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.	Pendekatan kontemporer menunjukkan urgensi penerapan Pancasila dalam kebijakan publik saat ini, sementara orientasi jangka panjang mengarahkan pada visi strategis untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing pada tahun 2045.	X10 dan Y10 berhubungan
----	--	---	-------------------------

KESIMPULAN

Pancasila, sebagai ideologi negara, memiliki peran strategis dalam membangun bangsa yang berkeadilan, berkesetaraan, dan berdaulat. Nilai-nilai dasar Pancasila memberikan landasan filosofis dan praktis yang relevan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, penerapan Pancasila tidak lepas dari tantangan internal dan eksternal, seperti inkonsistensi dalam interpretasi serta pengaruh ideologi lain yang bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan relevansi dan penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern.

Peningkatan Pemahaman dan Implementasi

Pendidikan Nilai Pancasila: Diperlukan upaya sistematis untuk menanamkan pemahaman mendalam terhadap kelima sila Pancasila melalui pendidikan formal, pelatihan bagi aparatur negara, serta sosialisasi di komunitas lokal. Nilai-nilai ini harus diterapkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya slogan simbolik.

Kebijakan Publik yang Pancasila: Pemerintah perlu memastikan bahwa semua kebijakan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, penguatan toleransi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi jargon politik, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan negara.

Relevansi Pancasila dengan Tantangan Global

Solusi Khas Indonesia: Di tengah dominasi kapitalisme dan komunisme di tingkat global, Pancasila menawarkan alternatif yang unik sebagai ideologi yang mengutamakan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan negara. Model ini dapat menginspirasi solusi bagi tantangan modern seperti ketimpangan sosial, krisis identitas budaya, dan kerusakan lingkungan.

Respon terhadap Globalisasi: Pancasila harus menjadi landasan untuk memperkuat kemandirian nasional sambil tetap terbuka terhadap kerja sama internasional. Misalnya, melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, Pancasila dapat menjadi alat untuk menghadapi homogenisasi budaya akibat globalisasi.

Saran

Penguatan Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pendidikan Nilai Pancasila: Masukkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam ke dalam kurikulum pendidikan formal, pelatihan aparatur negara, dan kegiatan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang utuh mengenai

Pancasila sebagai panduan hidup. Pelatihan untuk Pengambil Kebijakan: Berikan pelatihan khusus bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip Pancasila, terutama pada aspek keadilan sosial dan persatuan. Pengawasan terhadap Kebijakan Publik: Bentuk lembaga independen yang memantau kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila guna mencegah inkonsistensi dan potensi penyimpangan.

Memastikan Relevansi Pancasila dengan Tantangan Global

Adaptasi terhadap Dinamika Global: Integrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan yang menghadapi isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan konflik ideologis. Misalnya, gunakan pendekatan berbasis keadilan sosial untuk pengelolaan sumber daya alam.

Penguatan Diplomasi Budaya: Gunakan Pancasila sebagai identitas diplomasi Indonesia dalam kerja sama internasional, terutama dalam menunjukkan pentingnya keberagaman dan toleransi di tengah arus globalisasi.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemanfaatan Teknologi Informasi: Maksimalkan e-government untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat memantau proses pengambilan keputusan.

Penegakan Hukum yang Tegas: Perkuat lembaga antikorupsi dan penerapan hukum yang konsisten untuk memberantas praktik korupsi yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial.

Partisipasi dan Inklusivitas

Mendorong Keterlibatan Masyarakat: Ciptakan mekanisme yang mempermudah masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, seperti musyawarah berbasis komunitas, survei kebijakan, dan dialog publik. Memberdayakan Kelompok Rentan: Pastikan keterwakilan kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi

Penguatan Budaya Lokal: Lestarkan budaya tradisional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila melalui program pendidikan budaya, festival seni, dan kebijakan perlindungan warisan budaya.

Kampanye Nasionalisme Pancasila: Lakukan kampanye yang kreatif dan inklusif untuk menanamkan kembali semangat Pancasila di kalangan generasi muda, baik melalui media sosial, seni, maupun kegiatan komunitas.

Kolaborasi Multi-Stakeholder

Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat Sipil: Tingkatkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan kebijakan publik yang Pancasila.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: Libatkan akademisi dan praktisi independen untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, memastikan relevansi dan efektivitasnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjawab tantangan yang muncul di era globalisasi

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F., & Najicha, F. U. (2023). Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Global Citizen*, 12(1), 1–6. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>

- Anggono, B. D., & Damaitu, E. R. (2021). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 34–44. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.22>
- Barnett, H. (2021). Constitutional and administrative law. *Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 1–829. <https://doi.org/10.4324/9781003155638>
- Kusumawardani, S. S., Budimansyah, D., Triyanto, Wibowo, W., & Copik, M. (2024). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan. 32. <https://dikti.kemdikbud.go.id/book/modul-pembelajaran-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi-pendidikan-kewarganegaraan/>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Yogyakarta Press. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Situru, R. S. (2019). Pancasila dan Tantangan Masa Kini. *Elementary Journal : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.47178/elementary.v2i1.611>
- Sosial, I., & Raya, U. S. (2020). MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI. 01(01), 14–26.
- Statistik/BPS-Statistics, B. P. (2023). INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2023. *The Veterinary Record*, 123(9), 235. <https://doi.org/10.1136/vr.123.9.235>
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 133. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.133-148>
- Wijayanto, F. N., Felicia Sadida, K., Pradipta, I. P., & Maharani, A. (2023). Implementasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 205–206.